MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Januari 2016

Kepada:

Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Para Pimpinan Lembaga Non Kementerian

Nomor : 470/295/SJ
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup

SURAT EDARAN

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
2. Selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walapun telah habis masa berlakunya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami meminta kiranya Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Non Kementerian agar menugaskan Unit Pelayanan yang ada di bawah koordinasi Kementerian maupun Lembaga yang Saudara pimpin mematuhi ketentuan dimaksud dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO

Tembusan kepada Yth :
1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Ketua DPR-RI;
3. Ketua DPD-RI;
4. Ketua Komisi II DPR-RI;
5. Ketua Komite I DPD-RI;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 470/295/SJ
Tanggal : 29 Januari 2016

DAFTAR KEMENTERIAN KABINET KERJA
DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

I. Kementerian Kabinet Kerja

1. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Kemaritiman
4. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Sekretaris Negara
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Kementerian Keuangan
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
12. Kementerian Perindustrian
13. Kementerian Perdagangan
14. Kementerian Pertanian
15. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
16. Kementerian Perhubungan
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan
18. Kementerian Tenaga Kerja
19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21. Kementerian Kesehatan
22. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
23. Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
24. Kementerian Sosial
25. Kementerian Agama
26. Kementerian Pariwisata
27. Kementerian Komunikasi dan Informatika
28. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
29. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
31. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
32. Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Kepala BPN
33. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga
35. Kejaksaan Agung
36. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
37. Kepolisian Negara Republik Indonesia
38. Sekretariat Kabinet
39. Badan Intelijen Negara
40. Badan Koordinasi Penanaman Modal

II. Lembaga Pemerintah Non kementerian

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Ekonomi Kreatif (BEK)
3. Badan Informasi Geospasial (BIG)
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)
6. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
10. Badan Narkotika Nasional (BNN)
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
20. Badan Pusat Statistik (BPS)
21. Badan SAR Nasional (Basarnas)
22. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
24. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
25. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
29. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)